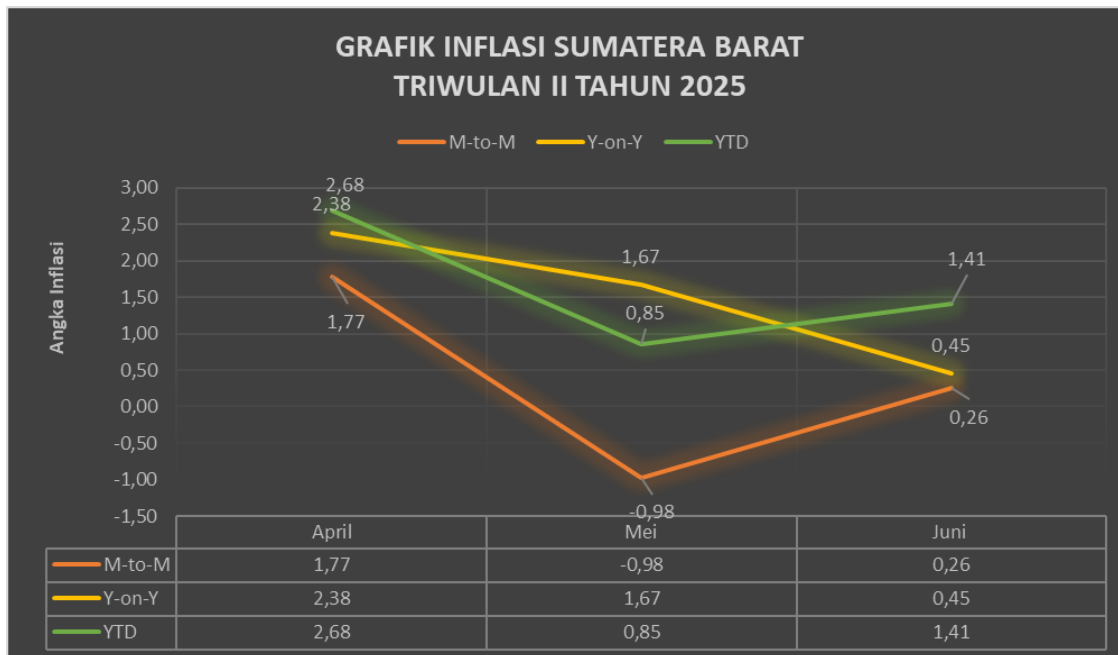


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut :

1. April 2025, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 1,77% (mtm), yang disumbang dari kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (3,72%) dimana tarif listrik dengan andil inflasi (0,65%) dan kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,95%), serta kelompok transportasi (2,11%). Untuk Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan komoditas penyumbang inflasi adalah cabai merah (0,48%), Bawang Merah (0,09%), kue basah (0,04%), nasi dengan lauk (0,03%), Jeruk dan santan segar masing masing (0,02%). Sedangkan komoditas penghambat inflasi adalah tarif Listrik (-1,37%), tomat (-0,03%), jengkol (0,02%), Buncis (-0,01%) dan bahan bakar rumah tangga (-0,01%). Secara tahunan Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 2,38% (yoy) lebih tinggi dibanding inflasi Maret yakni sebesar 0,03 % (yoy).
2. Mei 2025, Sumatera Barat mengalami deflasi sebesar -0,98%(mtm) terjadi penurunan yang sangat tajam dibanding bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,77%(mtm). Adapun penyumbang deflasi pada bulan Mei dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -2,89% (mtm) dan kelompok transportasi dengan andil sebesar -0,06% (mtm). Sedangkan komoditi penyumbang deflasi antara lain cabe merah dengan andil 0,77%, beras, -0,03, dan kentang, cabe rawit, emas perhiasan, bawang putih, ikan tongkol dan cabe hijau masing-masing dengan andil penurunan sebesar -0,02%. Secara Tahunan Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 1,67% (yoy) lebih rendah dibanding bulan April 2025 yang inflasinya sebesar 2,38%(yoy)
3. Juni 2025, Sumatera Barat inflasi sebesar 0,26% (mtm) terjadi peningkatan inflasi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,98% (mtm) dengan andil inflasi sebesar -0,26% yang disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,34%. Inflasi bulan Juni di dorong oleh kenaikan harga jengkol (0,05%), kontrak rumah, emas perhiasan, beras, daun seledri, beras, dan sate masing masing dengan andil (0,02%) serta angkutan udara, sigaret kretek mesin, mobil dan ikan tongkol masing masing sebesar (0,01%). Sedangkan secara tahunan Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,45% (yoy) lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yakni sebesar 1,67% (yoy).

Berikut fluktuasi inflasi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, baik secara bulanan, tahunan dan year to date, sebagai berikut :



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan II realisasi inflasi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dengan komoditi penyumbang inflasi antara lain cabai merah, bawang merah, jengkol, emas perhiasan dan angkutan udara. Adapun penyebab kenaikan inflasi pada triwulan II didorong oleh kenaikan harga dari kelompok volatile foods yakni cabe merah dan bawang merah disebabkan oleh penurunan produksi di beberapa daerah penghasil akibat musim kemarau dan curah hujan yang rendah sehingga menyebabkan kegagalan panen yang sejalan dengan pasokan dari luar Sumatera Barat juga berkurang. Untuk komoditi jengkol karena tingginya permintaan sementara pasokan terbatas. Jengkol merupakan tanaman musiman yang tumbuh liar di hutan dan tidak bisa diprediksi waktu produksinya. Emas perhiasan karena banyaknya masyarakat yang menjual emas untuk kebutuhan sekolah karena bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Demikian juga angkutan udara karena meningkatnya permintaan sejalan dengan meningkatnya mobilisasi masyarakat bertepatan dengan libur tahun ajaran sekolah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar inflasi tetap terjaga, tim pengendalian inflasi Sumatera Barat selama triwulan II tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah;
2. Melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
3. Penyaluran bantuan sosial kepada Masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban akibat kenaikan harga.
4. Pemberian subsidi untuk komoditas tertentu seperti bahan bakar minyak (BBM) atau pangan untuk menjaga harga tetap terjangkau.

Subsidi harga komoditas pangan melalui sinergi dengan Pemkab/Pemko dan CSR swasta;

1. Ketersediaan Pasokan

1. Sidak pasar secara rutin dan berkala.
2. Pengadaan bibit cabe, bawang merah, padi dan jagung dalam rangka meningkatkan produksi.
3. Menyiapkan lahan baru untuk peningkatan produksi pangan.
4. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan hilirisasinya.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan program peningkatan jaringan irigasi, pemakaian benih bermutu dan alsintan dalam mendorong peningkatan produksi pertanian;
6. Fasilitasi distribusi pangan ke Mentawai (ongkos angkut komoditi pangan) di fasilitasi Bank Indonesia.
7. Menjaga ketersediaan komoditas pangan dengan mengatur kalender tanam sesuai dengan waktu kemungkinan tingginya kebutuhan dan permintaan, terutama pada momen tertentu.
8. Mendorong dalam perencanaan tanam agar mempedomani neraca pangan.
9. Mengoptimalkan kerjasama perdagangan bahan pangan dengan Provinsi penghasil komoditi pangan, seperti cabe merah dan bawang merah.

2. Kelancaran Distribusi

6. Melakukan optimalisasi distribusi pangan.
7. Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh Bulog;
8. Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC);
9. Pengawasan jalur Distribusi dan akses logistik dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Sumbar.
10. Optimalisasi KAD antar dan intra daerah surplus ke daerah defisit.
11. Mendorong pelaksanaan KAD luar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi.
12. Mendorong pelaksanaan kerjasama antar daerah, karena secara prognosa neraca pangan Sumatera Barat untuk 6 bulan kedepan mengalami surplus setiap bulannya seperti beras, jagung, bawang merah, cabe merah, daging ayam ras dan telur ayam.
13. Penjajakan KAD dengan bidang pangan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

1. Komunikasi Efektif

1. Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendari setiap minggu.
2. Menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi.
3. Melaksanakan desk penyusunan roadmap pengendalian inflasi pada tanggal 10 s d 13 Juni 2025.
4. Pelaksanaan High Level Meeting TPID se Sumatera Barat pada tanggal 17 Juni 2025
5. Menerbitkan surat Gubernur Nomor : 500/243/Ro-Eko Setda/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Tindaklanjut High level Meeting Triwulan II Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat dan OPD terkait di provinsi Sumatera Barat.
6. Menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-384-2025 tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2027.

Menerima kunjungan TPID Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka peninjauan Kerjasama antar daerah bidang pangan pada tanggal 24 Juni 2025

8. Road Show Gubernur Sumatera Barat ke Provinsi se Sumatera dalam rangka Program “Galeh Babelok” mempromosikan potensi Sumatera Barat dan menangkap potensi provinsi lainnya untuk mendukung KAD.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti pada Triwulan II tahun 2025 diantaranya rapat teknis pengendalian inflasi, High Level Meeting, Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendagri dan beberapa kegiatan lainnya dalam rangka pengendalian inflasi seperti gerakan pangan murah, sidak pasar, kunjungan ke gudang bulog, fasilitasi ongkos angkut oleh Bank Indonesia, Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat maupun provinsi tetangga. Berbagai kegiatan tersebut diatas dalam rangka upaya yang dilakukan dalam kegiatan pengendalian inflasi pada periode triwulan II Tahun 2025. Secara umum selama triwulan II inflasi Sumatera Barat relatif terkendali dan ini tidak terlepas dari komitmen serta kolaborasi tim pengendalian inflasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga realisasi inflasi sesuai target dan sasaran inflasi nasional yakni $2,5 \pm 1\%$.

Beberapa kebijakan yang diterbitkan selama triwulan II cukup memberikan hasil yang signifikan yang bisa dilihat dari realisasi inflasi Sumatera Barat pada bulan April sebesar 1,77% (mtm), Mei sebesar -0,98% (mtm) dan Juni sebesar 0,26% (mtm). Sedangkan secara tahunan inflasi Sumatera Barat pada April sebesar 2,38% (yoy) lebih tinggi dari nasional yakni sebesar 1,17% (yoy), Mei sebesar 1,67% (yoy) sama dengan nasional yakni (1,6%yoy) dan Juni sebesar 0,45% (yoy) lebih rendah dari nasional (1,87%yoy). Terkendalnya inflasi Sumatera Barat tidak terlepas dari kerja aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat yang secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi berbasis 4 pilar utama 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga

- Gerakan Pasar Murah dan Operasi Pasar di seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- Penyaluran bantuan sosial kepada Masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban akibat kenaikan harga.
- Pemberian subsidi untuk komoditas tertentu seperti bahan bakar minyak (BBM) atau pangan untuk menjaga harga tetap terjangkau.
- Subsidi harga komoditas pangan melalui sinergi dengan Pemkab/Pemko dan CSR swasta;

2. Ketersediaan Pasokan

- Konsisten melaksanakan sidak pasar secara rutin dan berkala.
- Mendorong pembukaan lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan.
- Mendorong dalam perencanaan tanam agar mempedomani neraca pangan.
- Mengoptimalkan kerjasama perdagangan bahan pangan dengan provinsi penghasil komoditi pangan, seperti cabe merah dan bawang merah
- Peningkatan cadangan pangan strategis daerah, khususnya beras, cabai, bawang,

minyak goreng, dan telur;

- Pemanfaatan dan perluasan lahan pertanian produktif berbasis nagari, terutama untuk hortikultura (cabai, tomat, bawang);
- Koordinasi rutin dengan Bulog untuk menjaga ketersediaan beras SPHP dan bahan pokok bersubsidi;
- Pemberdayaan BUMNag dan koperasi pangan dalam menjaga cadangan stok di daerah pinggiran dan perdesaan/Jorong Nagari.

3. Kelancaran Distribusi

- Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dalam distribusi bahan pangan pokok (beras, telur, cabai, daging) antara Sumbar dan provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi.
- Mendorong optimalisasi distribusi pangan.
- Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh Bulog;
- Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC);
- Mengoptimalkan Pengawasan jalur Distribusi dan akses logistik dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Sumbar.
- Optimalisasi KAD antar dan intra daerah surplus ke daerah defisit.
- Mendorong pelaksanaan KAD luar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi.
- Mendorong pelaksanaan kerjasama antar daerah, karena secara prognosa neraca pangan Sumatera Barat untuk 6 bulan kedepan mengalami surplus setiap bulannya seperti beras, jagung, bawang merah, cabe merah, daging ayam ras dan telur ayam.
- Koordinasi Intensif Tindak lanjut penjajakan KAD bidang pangan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

4. Komunikasi Efektif

- Tetap konsisten menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendari setiap minggu.
- Tetap berkoordinasi dengan Dinas Pangan dan Dinas Perindag dalam rangka informasi harga mingguan Komoditi Pangan
- Melaksanakan rencana aksi tahunan sesuai Roadmap Pengendalian inflasi yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-384-2025 tentang Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2027.
- Memonitor pelaksanaan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam surat Gubernur Nomor 500/243/Ro-Eko Setda/2025 tanggal 7 Juli 2025 perihal Tindaklanjut High Level Meeting Triwulan II Tahun 2025 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat dan OPD terkait di provinsi Sumatera Barat.
- Berkoordinasi dengan TPID Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka rencana kerjasama antar daerah bidang pangan.
- Berkoordinasi dengan Provinsi se Sumatera dalam rangka Tindak Lanjut Program “Galeh Babelok” dalam mendukung KAD.